Persamaan Nilai-Nilai HAM dalam Deklarasi Universal HAM PBB¹ Dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Ajaran Alkitab Sebagai Dasar Sikap Etis Kristen dalam Kehidupan dan Berbangsa

Dennie Olden Frans

Pendeta Gereja Kristus – Dosen Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

Dennie.frans@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai HAM berdasarkan deklarasi universal HAM PBB dalam kesamaan nilai dengan dasar negara Republik Indonesia PANCASILA dan UUD 1945 serta Alkitab yang menjadi dasar sikap etis Kristen. Studi banding tentang nilai-nilai yang sangat penting ini diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang saling menghargai. Penulis berharap tulisan sederhana ini dapat menjadi pengingat bagi orang Kristen di Indonesia untuk berlaku benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: HAM, Pancasila, UUD RI 1945, Sikap Etis, Kristen.

PENDAHULUAN

Menyimak situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia belakangan ini, Penulis melihat betapa pentingnya pemahaman yang baik tentang HAM, mensosialisasikan secara terus-menerus dengan harapan dapat memberi pencerahan dan menjadi pola laku dalam kehidupan bersama sebagai anak negeri. Tulisan sederhana ini berupaya melihat kesamaan nilai dalam Deklarasi Universal HAM PBB, Pancasila dan UUD45 serta beberapa pokok ajaran Alkitab sebagai dasar etika Kristen. Sangatlah penting memahami HAM yang adalah hak dan kewajiban semua manusia bukan hanya karena statusnya sebagai warga dari suatu negara, tetapi hak yang melekat padanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam Bagian pendahuluan ini akan mengulas secara ringkas apa yang dimaksud dengan HAM, dalam pengertian yang diterima oleh masyarakat internasional yang tertuang dalam deklarasi Univesal HAM PBB dan persamaannya dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu PANCASILA serta Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Terlampir, 19-24

Pengertian HAM

Untuk memahami permasalahan HAM sangatlah penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan HAM, dalam pengertian yang diterima secara universal.

1. HAM dalam pengertian secara Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pada umumnya menjadi patokan untuk mengerti suatu istilah dalam konteks masyarakat Indonesia, mengartikan HAM sebagai Hak yang dasar atau hak pokok manusia (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan).² Pengertian ini menunjuk pada penerimaan secara universal bahwa manusia memiliki hak yang sifatnya asasi karena keberadaannya sebagai manusia. Hak yang ia miliki bukan hanya karena ia adalah anggota dari suatu masyarakat, warga negara,³ dan lain sebagainya, tetapi haknya oleh karena ia adalah manusia. Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa HAM adalah Hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya sebagai manusia yang bermartabat.⁴ Prof. Miriam Budiardjo dalam kumpulan karangannya menuliskan bahwa:

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam preambule Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dari PBB dirumuskan: These rights derive from the inherent dignity of the human person (hak-hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap 'universal' artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.⁵

Atau dengan kata lain, HAM adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia karena ia adalah manusia. Hak yang ia miliki bukan karena pemberian seseorang, masyarakat atau bahkan negara, tetapi hak yang ia miliki sebagai

² Anton Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988). 292

³ Harus dibedakan dengan jelas, antara hak seseorang sebagai warga negara dan hak seseorang karena ia adalah manusia. Hak sebagai warga negara tentu dimiliki oleh karena status kewarganegaraannya, dan berlaku dalam kurun waktu serta tempat tertentu. Tetapi haknya sebagai manusia, dalam konteks negara manapun, ia memiliki hak tersebut.

⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1987).

⁵ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 1994). 144

manusia, manusia ciptaan Tuhan. Atau seperti yang dikemukakan oleh John Stott menegaskan pendapat *Thomas Paine*⁶;

*Hak-hak manusia adalah hasil kejadian, bukan hasil 'jerih payah' manusia. Bukan pula yang dianugerahkan pemerintah atau penguasa lain. Manusia telah memilikinya dari semula. Ia menerimanya bersama hidupnya dari tangan penciptanya. Hak-hak itu inheren dalam penciptaannya. Hak-hak itu diberikan oleh penciptanya.*⁷

2. *Ham menurut Deklarasi Universal HAM PBB*⁸

Sebagai bagian dari warga dunia, dan anggota PBB, Indonesia terikat dengan deklarasi universal HAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, pada tanggal 10 Desember 1948.⁹ Dan itu berarti, Indonesia dalam keseluruhan keberadaannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bagian dari masyarakat dunia, pasti ikut aktif menjalankan serta menghargai HAM.

Adapun 30 pasal dari Deklarasi Universal HAM oleh PBB¹⁰ dapat diklasifikasikan serta diringkaskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:¹¹

- a. *Preambul dan Pasal 1-5*, hak manusia yang sama secara universal berhubungan dengan hak pribadinya sebagai manusia yang bermartabat. Hak yang dimilikinya tanpa pembedaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, atau keyakinan lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Atau bahkan pembedaan pun tidak dapat dilakukan oleh karena status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, dll.

⁶Thomas Paine dalam *"Dissertation on First Principles of Government"* 1795, menuliskan: "Tetapkan hak-hak asasi manusia, junjung tinggi kesetaraannya...jangan biarkan ada hak-hak istimewa. Tidak ada perbedaan karena kelahiran, dan tidak ada monopoli . . ." dalam, Geoffrey Robertson QC., *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2000) hlm. 3

⁷ John Stott, *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994). 114

⁸ Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: KomNas HAM RI, 2000). 577 Lihat lampiran halaman 19-25

⁹ibid, hlm. 47

¹⁰selengkapnya lihat pada lampiran tentang Deklarasi Universal HAM oleh PBB

¹¹Rincian kutipan dari deklarasi universal HAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, pada tanggal 10 Desember 1948.

- b. *Pasal 6-12*, Kesamaan hak di depan hukum
- c. *Pasal 13-15*, hak atas hak yang diterima sebagai warga negara
- d. *Pasal 16-17*, hak memiliki keluarga, kekayaan
- e. *Pasal 18-19*, hak beragama, berpikir dan menyatakan pendapat, baik secara pribadi maupun kelompok
- f. *Pasal 20*, hak untuk berkumpul secara damai dan berserikat
- g. *Pasal 21* Hak sebagai warga negara terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa dan negara
- h. *Pasal 22-25*, Hak sebagai pekerja, upah, liburan, kesejahteraan, perlindungan sosial.
- i. *Pasal 26*, hak memperoleh pendidikan, pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar.
- j. *Pasal 27*, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memperoleh perlindungan terhadap karya ciptanya
- k. *Pasal 28-30*, hak atas hak asasi manusia sesuai ketentuan yang universal.

Menyimak pasal demi pasal dalam deklarasi HAM PBB, maka jelas terlihat bahwa; manusia memiliki hak, oleh karena keberadaannya sebagai manusia, hak yang mendasar/asasi secara pribadi yang tidak boleh dilanggar atau ditiadakan oleh siapapun dan dengan cara dan alasan apapun. Manusia memiliki hak bukan hanya oleh karena keberadaannya sebagai manusia, tetapi juga karena ia adalah warga negara dan warga dunia yang seharusnya dilindungi hak-haknya.

***Pancasila/Dasar negara RI dan UUD 45
dalam kaitan dengan Deklarasi Universal HAM PBB***

Memperhatikan Deklarasi Universal HAM PBB dengan Pancasila yang adalah dasar negara RI serta UUD 1945 yang merupakan dasar dan acuan dari semua produk; undang-undang, peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, keputusan menteri serta juga peraturan daerah, mempunyai persamaan yang sangat mendasar. Berikut ini akan dipaparkan hal tersebut.

1. Sila Pertama Pancasila dan UUD 1945 Pasal 29 serta HAM PBB psl 18

Sila pertama Pancasila adalah; *Ketuhanan yang Maha Esa*. Dalam penjelasan tentang Sila pertama pada buku yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara RI dikemukakan bahwa,

“...manusia Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama...sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.”¹²

Memperhatikan penjabaran dari Sila Pertama Pancasila, jelas nampak semua sama dan terkait erat dengan Deklarasi Universal HAM PBB pasal 18.

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.”¹³

Hak yang sangat mendasar ini dituangkan dalam **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, ayat 2**, bahwa; *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*¹⁴

2. Sila kedua Pancasila dan UUD 45 pasal 27, ayat 1 serta HAM PBB pasal 1,5,6,7,15

Sila kedua Pancasila adalah: *“Kemanusiaan yang adil dan beradab.”*

Menurut penjabaran dari sekretariat negara tentang sila kedua Pancasila, bahwa;

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis besar Haluan Negara* (Jakarta: SekNeg RI, n.d.). 33

¹³ Lihat lampiran Deklarasi Universal HAM PBB.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis besar Haluan Negara.*, 7

*Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, dan sama haknya dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa selira”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.*¹⁵

Berkaitan dengan Sila kedua Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, menyatakan bahwa; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁶ Dan jika segala Warga Negara harus menerima perlakuan yang sama dihadapan hukum dan undang-undang, apalagi warga negara adalah umat manusia yang memiliki hak asasi.

Sila kedua Pancasila dan Undang-undang Dasar 45, secara tegas menyatakan bahwa sebagai warga Negara Indonesia, memiliki hak untuk diperlakukan adil dan beradab, tanpa membedakan keberadaannya sebagai manusia. Hal yang sama ditegaskan dalam Deklarasi HAM PBB, pasal 1; manusia lahir merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama..., 5; Perlakuan yang baik kepada manusia dan tidak merendahkan martabat manusia..., 6; hak diakui didepan hukum dimana saja, 7; hak atas perlindungan...tanpa diskriminasi..., 15:1; hak atas kewarganegaraan, dan lain-lain.¹⁷

3. Sila Ketiga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26,27, 30., serta HAM PBB pasal 15, 16, 21

Sila ketiga dari Pancasila adalah, “*Persatuan Indonesia.*” Sila yang menegaskan bahwa manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.¹⁸ Jika memperhatikan hal ini, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya tidak ada kepentingan pribadi dan kelompok yang ditempatkan di atas kepentingan dan keselamatan bangsa. Artinya tidak

¹⁵ibid, 31

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis besar Haluan Negara.* 7

¹⁷Lihat lampiran Deklarasi Universal HAM PBB.

¹⁸Sekretariat Negara RI, hlm. 31

boleh ada pementingan diri sendiri yang mengakibatkan diskriminasi serta pelanggaran HAM dan perpecahan sebagai anak bangsa. Untuk kepentingan Persatuan Indonesia.

Undang-undang dasar 1945 memuat beberapa pasal yang secara tegas menyatakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Antara lain; pasal 26, warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Dan sebagai sesama warga negara walau berbeda latar belakang mereka harus mementingkan dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Bukan kepentingan suku tertentu, golongan tertentu, agama tertentu dan lain sebagainya yang pada akhirnya tidak mencerminkan persatuan Indonesia. Atau bahkan mengakibatkan pelanggaran HAM. Demikian juga dengan Pasal 27 ayat 1; bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 30 ayat 1; mengungkapkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.¹⁹ Dalam deklarasi ham PBB, hak dan kewajiban ini juga diatur dengan jelas dalam beberapa pasal, antara lain; pasal 15, 16, 21.²⁰

4. Sila Keempat Pancasila dan UUD 1945 Pasal 26-29, 31-34 serta HAM PBB Pasal 1-5, 6-11, 16-20, 26.

Sila keempat Pancasila; “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*” Sila ini dalam penjabarannya menyatakan bahwa, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Oleh sebab itu, tidak ada pemaksaan kehendak kepada pihak lain. Keputusan harus melalui musyawarah dan mufakat. Tidak memberi tempat hanya pada kepentingan golongan atau kelompok tertentu tetapi menempatkan kepentingan bersama di atas semua.²¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dituangkan secara jelas dalam Pasal 26, 27, 28 tentang warga negara, pasal 29, tentang agama, pasal 31, 32,

¹⁹ibid, 7

²⁰Lihat lampiran Deklarasi Universal HAM PBB.

²¹Sekretariat..., hlm. 32

tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 33,34 tentang kesejahteraan sosial.²² Sedangkan dalam deklarasi Universal HAM PBB, hal yang sama tertulis dalam pasal; Pasal 1-5 hak dasar sebagai manusia yang bermartabat, pasal 6-11, hak yang sama di depan hukum, pasal 16 hak berkeluarga tanpa diskriminasi, pasal 17-20, hak memiliki, kemerdekaan berpikir, beragama, hak berpendapat, berkumpul dan secara damai, dll. Pasal 26 hak mendapatkan pendidikan.²³

5. Sila kelima Pancasila dan UUD 45 Pasal 26-29, 31-34 serta HAM PBB Pasal 1-30.

Sila kelima Pancasila; *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Satu sila yang sangat penting yang menunjukkan tentang pedulinya bangsa dan negara Indonesia pada hak masyarakat Indonesia untuk diperlakukan adil. Sila yang merujuk pada sikap yang adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Menghargai hasil karya orang lain, dan lain sebagainya.²⁴ Sila kelima juga merupakan tujuan dari seluruh pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Mencapai masyarakat yang menikmati keadilan sosial, tanpa diskriminasi.

Sila kelima Pancasila seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut hemat penulis, tidak hanya merujuk kepada beberapa pasal saja, tetapi keseluruhan pasal dalam UUD 45. Sebab dalam pasal 1-25; tentang bentuk negara, tentang perwakilan rakyat, pengaturan pemerintahan pusat dan daerah, keuangan, kehakiman, semuanya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial dan makmur. Dan sudah tentu termasuk Pasal 26-37.²⁵

Dari uraian di atas, jelas terlihat betapa erat kaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan HAM yang diterima secara universal. Atau Pancasila dan UUD 45 sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM.

²²Sekretariat Negara RI..., hlm 18-20

²³ Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global*. 578-583

²⁴Sekretariat Negara RI, hlm. 32-33

²⁵ibid, 1-8

HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF ALKITAB²⁶

Dalam bahasan ini, akan dikemukakan hal-hal mendasar tentang HAM ditinjau dari perspektif Alkitab,

Martabat Manusia

Alkitab dengan jelas menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan.²⁷ Dan Allah memberikan kepada mereka mandat atas bumi ciptaan Allah.²⁸

Louis Berkhof menyatakan bahwa:

*Doktrin tentang gambar dan rupa Allah dalam diri manusia sangat penting dalam teologi, sebab gambar dan rupa Allah ini adalah suatu kualitas yang menjadikan manusia istimewa dalam hubungannya dengan Allah. Kenyataan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah menjadikan manusia berbeda dengan binatang dan semua makhluk yang lain.*²⁹

Dalam hubungannya dengan penciptaan manusia, dan martabat manusia. John Stott mengemukakan bahwa:

*Dengan demikian maka semua hak manusia adalah pada dasarnya hak untuk menjadi manusia. Artinya, hak untuk menikmati martabat sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan karena konsekuensinya mempunyai hubungan yang unik terhadap Allah sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap bumi. Orang Kristen mempunyai sesuatu yang penting untuk ditambahkan lagi pada kenyataan ini, yakni bahwa Pencipta kita juga telah menyelamatkan dan menciptakan ulang kita, dengan pengorbanan pribadi yang besar, melalui inkarnasi dan penebusan Anak-Nya. Dan harga yang mahal yang harus dibayar Allah untuk menyelamatkan dan menciptakan ulang kita, memperkuat lagi ketinggian nilai dengan mana penciptaan sudah memodali kita pada waktu kita diciptakan*³⁰

Artinya, membicarakan HAM tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia yang adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Sang Penciptanya. Sebab di sanalah terletak hak asasi, hak dasarnya manusia. Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang memiliki martabat mulia.

²⁶ Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014).

²⁷ Roma 3:26, Efesus 4:17-32

²⁸ Kejadian 1:27-28

²⁹ Louis Berkhof, *Teologi Sistematika jilid 2* (Jakarta: LR II, 1995). 53-54

³⁰ Stott, *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen*. 202

Manusia disebut manusia bukan karena usaha manusia dan pemberian siapapun tetapi, karena Allah Sang Pencipta. Dan haknya sebagai manusia melekat erat dalam dirinya sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia. Manusia memiliki hak asasi sebab ia adalah manusia yang bermartabat. Dan haknya tidak dapat ditiadakan oleh siapapun.

Maka tepatlah seperti yang dikemukakan dalam Preambul Deklarasi Universal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, *“Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia...”*³¹

Kesejajaran atau sederajat

Jika menyimak tiap permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, selalu berkait erat dengan adanya sikap yang menganggap satu kelompok masyarakat manusia, merasa lebih dari kelompok yang lainnya. Simak saja semua pelanggaran HAM yang terjadi. Khususnya di Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti: Kasus Medan, kasus Kupang, kasus Ketapang, kasus Kediri, kasus Purwakarta, Kasus Pasuruan, kasus Bandung, kasus Ngabang, kasus Ujung Pandang, kasus Gambir, kasus 27 Juli Jakarta, kasus Bandar Lampung, kasus Pekalongan, kasus Nusa Tenggara Timur, kasus Timor Timur, kasus Cikampek kasus Surabaya, kasus Situbondo, kasus Tasikmalaya, kasus Sanggau Ledo.³² Belum lagi ditambah dengan kasus; Papua, Aceh, Ambon-Maluku dan Poso, yang begitu kental dengan pelanggaran HAM.

Alkitab mengajarkan bahwa sejak penciptaan manusia memiliki kesejajaran atau sederajat. Permasalahannya bukan hanya pada sederajatnya nilai manusia antara laki-laki dan perempuan, tetapi kesejajaran semua umat manusia. Sebab sebagaimana manusia memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia yang bermartabat, tetapi juga karena semua manusia adalah sama. Sama-sama manusia dengan keberadaannya sebagai manusia. Sama-sama ciptaan Allah. Dalam arah yang sama John Stott menuliskan bahwa: Semua pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia adalah bertentangan dengan kesamaan hak dan derajat yang kita miliki berdasarkan ciptaan.³³ Di sisi yang lain, Louis

³¹ Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global*. 577

³² Herlianto, *Gereja-gereja di tengah Gejolak Kota* (Bandung: YABINA, 1997). 63-100

³³ John Stott, *Isu-isu Global...*, hlm. 206

Berkhof menjelaskan kesejajaran dan kesederajatan manusia dari sisi Asal mula manusia dan kesatuan umat manusia.

Alkitab mengajarkan bahwa seluruh keturunan manusia berasal dari satu pasang manusia. Pernyataan ini jelas kita lihat sejak pembukaan kitab Kejadian. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai awal dari spesies manusia, dan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi muka bumi. Lebih lanjut kitab Kejadian pada pasal-pasal berikutnya menunjukkan bahwa generasi berikutnya sampai pada peristiwa air bah tidak pernah terputus secara genetis dari pasangan tunggal yang pertama itu, sehingga umat manusia bukan saja membentuk satu kesatuan spesifik, kesatuan dalam arti bahwa semua manusia mempunyai natur manusia yang sama, tetapi juga kesatuan genetis dan ikatan keluarga.³⁴

Selanjutnya dengan mengutip surat Paulus, Louis Berkhof menyatakan:

Kebenaran ini juga diajarkan oleh Paulus dalam Kisah 17:26 “Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka”³⁵

Beberapa pandangan Teologis yang dibangun atas dasar Alkitab yang dikemukakan di atas menyatakan dengan jelas bahwa, manusia adalah sederajat dalam keberadaannya sebagai manusia dan juga mempunyai nilai sejajar sebagai ciptaan dan keturunan dari asal mula yang sama, keturunan manusia.

Hukum kasih

Salah satu hal mendasar yang diajarkan oleh Alkitab, tentang bagaimana sikap dan tindakan manusia baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama ialah “KASIH”. Tuhan Yesus Kristus menyimpulkan keseluruhan pengajaran Perjanjian Lama serta menegaskannya dalam Perjanjian Baru adalah sebagai berikut:

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.”³⁶

Kesimpulan Tuhan Yesus tentang hukum kasih ini, mengemukakan kepada kita beberapa hal yang mendasar yang tentu berhubungan dengan hak asasi manusia:

³⁴Louis Berkhof, Teologi Sistematika 2, ... hlm. 18

³⁵ibid

³⁶Injil Matius 22:37-40, Markus 12:28-34, Lukas 10:25-28

1. *Dari sisi aspek kasih*

- a. Yang harus dilakukan manusia dalam hubungannya dengan Allah & sesama adalah kasih, saling mengasihi.
- b. Mengasihi berarti aktif melakukan tindakan kasih dan didasarkan pada kasih, bukan menunggu untuk dikasihi. Atau mengasihi jika dikasihi.
- c. Mengasihi pertimbangannya bukan datang dari luar tapi dari diri sendiri, atau bukan pada siapa yang dikasihi tapi pada saya diperintahkan mengasihi.
- d. Mengasihi antara sesama manusia tidak didasarkan pada apakah ia satu suku, bangsa kelompok, golongan, ide, dan lain-lain, tetapi pada keberadaannya sebagai manusia.
- e. Mengasihi sesama manusia adalah mengasihi dengan kasih yang tulus dan dengan ukuran, seperti kita mengasihi diri sendiri.
- f. Mengasihi adalah ajaran Allah yang dinyatakan di dalam Kitab suci
- g. Jika mengasihi adalah perintah Allah, maka manusia harus melaksanakannya.
- h. Karena perintah adalah kasih, maka sesungguhnya tidak ada tempat dalam kehidupan manusia untuk harus melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap HAM. Bahkan kepada yang melakukan kejahatan sekalipun, lihat pengajaran Tuhan Yesus dalam Khotbah di Bukit.³⁷

2. *Perbuatan Baik atau kebajikan Kristen.*

Jika Hukum kasih yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah kesimpulan dari Perjanjian Lama dan menjadi pokok berita Perjanjian Baru, maka Kasih bukan hanya sesuatu yang ada dalam pikiran atau perasaan, tapi kasih adalah tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari.

a. *Pengajaran Tuhan Yesus.* Perbuatan Baik adalah salah satu pengajaran yang sangat hakiki yang diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini nampak dengan jelas dalam argumentasi Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi dan para pemuka agama dan pengajarannya kepada para murid:

- Matius 12:12, “boleh berbuat baik pada hari sabat...”,
- Luk.6:27, “berbuat baiklah pada orang yang membenci kamu...”

³⁷Matius 5:43-48

- Mat. 5:16, “...supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik...”

b. Surat Paulus. Hal yang sama juga nampak pada surat-surat Paulus. Paulus sangat menekankan perbuatan baik kepada jemaat penerima surat dan juga kepada para pelayan Tuhan, antara lain;

- Roma 12:21, “kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan...”
- Filipi 4:5: “hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang...”
- Galatia 6:9-10, “janganlah kita jemu-jemu berbuat baik... marilah kita berbuat baik kepada semua orang...”
- 2Tes.1:11, “menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik...”
- 1 Timotius 6:18, “peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik...”
- Titus 2:7, “suatu teladan dalam berbuat baik...”
- 2 Timotius 3:17, “diperengkapi untuk setiap perbuatan baik...”

c. Surat Petrus. Dalam Surat satu Petrus, perbuatan baik sangat ditekankan, atau bahkan seperti menjadi inti pengajaran surat 1 Petrus kepada jemaat di tengah-tengah penderitaan:

- Perbuatan baik kepada diri sendiri 1 Pet. 1:13-23
- Berbuat baik terhadap mereka yang memfitnah, 1 Pet. 2:11-12
- Perbuatan baik terhadap pemerintah 1 Petrus 2:13-16
- Berbuat baik kepada orang / tuan yang berlaku jahat sekalipun, 1 Petrus 2:18-21
- Perbuatan atau kelakuan yang baik dari istri kepada suami yang tidak percaya, 1 Petrus 3:1-7
- Perbuatan baik terhadap sesama orang percaya di tengah-tengah penderitaan, 1 Pet. 3:8-12, 4:7-11
- Berbuat baik kepada orang yang tidak percaya, 1 Petrus 3:13-22
- Sedia menderita karena nama Tuhan adalah perbuatan yang baik dalam iman Kristen, 1 Petrus 4:12-19
- Perbuatan baik dari para gembala kepada jemaat, 1 Petrus 5:1-4

d. Surat-surat lainnya dalam Perjanjian Baru Perbuatan baik juga menjadi berita, antara lain:

- Ibrani 13:16, “janganlah kamu lupa berbuat baik...”
- Yakobus 4:17, “jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya...”

- 3 Yohanes 11, “siapa berbuat baik ia berasal dari Allah.”

3. *Kabar Baik / Shalom!*

Selanjutnya, jika Hukum kasih adalah kesimpulan dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, maka Hukum kasih tersebut harus merujuk kepada puncak berita yaitu; Kabar Baik, berita Injil Yesus Kristus, atau menghadirkan shalom atau damai sejahtera dan keadilan atas bumi ini. Itulah sebabnya pada waktu kelahiran Yesus Kristus ke dunia, berita yang disampaikan melalui Pujian para malaikat ialah: “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”³⁸ Kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa damai sejahtera atau shalom hanya akan terjadi jika manusia berdosa dikenan Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam keseluruhan pengajaran Alkitab membicarakan damai sejahtera atau shalom tidak dapat dilepaskan dari Yesus Kristus yang menurut nubuatan Yesaya 27:5, adalah Raja Damai.

Dan selanjutnya ditegaskan oleh Yesus Kristus seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes 14:27, bahwa Ia adalah pemilik dan pemberi damai sejahtera atau shalom dan damai sejahtera itu diberikan kepada murid-muridnya. Tentu hal itu terjadi karena pendamaian yang dikerjakanNya di Bukit Golgota. Dalam Injil Matius 5:9, pada waktu khotbah di Bukit; Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang-orang percaya juga disebut sebagai pembawa Damai atau shalom. Istilah yang menyatakan bahwa Identitas serta Aktifitas orang kristen adalah Pembawa damai. NIV menterjemahkan dengan “PEACEMAKERS”.³⁹ Jelas nampak bahwa orang Kristen tidak diperintahkan melakukan tindakan yang melanggar HAM tetapi menjunjung tinggi HAM dengan jalan menjadi orang yang berhati damai serta membawa damai bagi umat manusia. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa kedamaian, membawa damai terjadi oleh karena Karya pendamaian yang dikerjakan Kristus. Hal ini juga sekaligus berarti bahwa membawa damai adalah panggilan Kristen. Orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang sungguh menghargai HAM.

³⁸Lukas 2:14

³⁹ Kenneth Barker, ed., *The NIV Study Bible* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1985). 1449

SIKAP ETIS KRISTEN

Sebagai Warga negara dan sekaligus warga kerajaan Allah, orang Kristen semestinya memiliki sikap etis yang dapat menjawab permasalahan:

Hadir sebagai Pembawa Shalom, kabar baik.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa Alkitab secara jelas mengajarkan tentang keberadaan orang kristen yang harus membawa shalom. Bukan pembuat kerusuhan. Dalam tulisannya John Stott mengemukakan beberapa hal penting sehubungan dengan kehadiran yang membawa shalom:

1. Semangat juang orang Kristen pembawa damai harus pulih,
2. Orang kristen pembawa damai harus berdoa,
3. Jemaat Kristen pembawa damai harus menjadi contoh suatu masyarakat yang damai
4. Orang kristen pembawa damai harus menyumbang dalam membangun rasa saling percaya,
5. Orang kristen pembawa damai harus mendukung peningkatan tukar pendapat secara terbuka.⁴⁰

Atau dapat diringkaskan, bahwa orang Kristen adalah orang yang; bertobat, berdoa, bersaksi, berbagi, berdialog. Membawa damai yang menjadi berita Injil Yesus Kristus. Berita yang dapat mengubah hati tiap orang berdosa, adalah inti dari Shalom. Sinclair B. Ferguson menuliskan dalam bukunya Khotbah di Bukit, bahwa;

*Seperti juga kalimat bahagia lainnya, pernyataan ini berulang kali disalahartikan. Yesus tidak sekedar berbicara mengenai penghentian permusuhan di antara bangsa-bangsa. Ia berbicara mengenai penghentian permusuhan antara manusia dengan Allah. Misi pendamaian semacam inilah yang dilakukannya di dunia.*⁴¹

Hadir sebagai pembawa shalom adalah kewajiban Kristen. Ia hidup dalam shalom, dan menjadi pemberita shalom. Karena dengan hidup dalam shalom, seseorang dapat memberitakan syalom dengan tepat. Tetapi kabar baik itu, syalom itu pun disampaikan dengan cara Tuhan Yesus. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita. Sebab tiap orang

⁴⁰ John Stott, *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen*. 137-15

⁴¹ Sinclair B. Ferguson, *Khotbah di Bukit* (Surabaya: Momentum, 1999).44

bebas menentukan keberadaan dirinya dalam konteks HAM. Untuk hal ini Verkuyl menuliskan:

Tuhan Yesus mau meyakinkan kita dengan Roh Kudus. Tetapi Ia tidak menggunakan paksaan. Ia mengetuk pintu, bukan mendobrak pintu. Ia menghendaki supaya kita mengambil keputusan dengan sukarela, tetapi Ia tidak memaksa. Dan barang siapa memaksa atas nama Kristus, seperti yang pernah ada dan masih juga terjadi, iapun menyalahgunakan nama Tuhan Yesus; ia menggunakan nama Tuhan Yesus dengan sia-sia.⁴²

Hadir dengan menerapkan kasih serta Perbuatan baik

Orang kristen tidak diajarkan oleh Alkitab untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Warga gereja tidak diajar oleh Alkitab untuk melakukan teror, penganiayaan, penindasan, diskriminasi dan lain sebagainya yang melanggar HAM. Tetapi diajarkan untuk sedia mengampuni dan selalu melakukan perbuatan kasih. Mengasihi walaupun telah diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Mengasihi walaupun haknya sebagai warga negara maupun hak dasarnya sebagai manusia diinjak-injak. Orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi walaupun tidak dikasihi. Mengasihi bukan hanya karena orang kristen dikasihi, Dibenci bahkan mengalami penderitaan sekalipunpun, orang kristen harus tetap mengasihi⁴³.

Tuhan meminta dari kita, supaya jangan hanya hidup kita sendiri saja yang kita terima dan kita hargai sebagai anugerah, tetapi hidup orang lainnyapun hendaknya kita hargai, kita kasihi dan kita hormati sebagai anugerah dari Tuhan. Sesama manusia adalah suatu pemberian dari Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita hidup terpencil dan kesepian, melainkan supaya kita hidup di dalam persekutuan dengan orang-orang lain. Tuhan menciptakan sesama manusia. Tuhan menghendaki, supaya ada kasih di antara manusia dan manusia, jenis kelamin dan jenis kelamin, keturunan dan keturunan, bangsa dan bangsa ras dan ras.⁴⁴

Berkaitan dengan hukum kasih, maka sekaligus kehadiran orang kristen di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia adalah kehadiran dari kelompok masyarakat yang tidak jemu-jemu melakukan Perbuatan Baik. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sarat dengan pengajaran tentang Perbuatan baik.⁴⁵ Seperti yang Tuhan Yesus katakan dan

⁴² J Verkuyl, *Etika Kristen, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989).

⁴³telah dibahas secara khusus dalam pokok Landasan theologis lihat pada halaman 15-16

⁴⁴ J Verkuyl, *Etika Kristen Kapita Selekt* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982). 230

⁴⁵Pembahasan pada halaman 17-18

ajarkan, perhatikan yang susah dan terlantar dan menderita.⁴⁶ Serta terus menerus menyampaikan berita kesukaan,⁴⁷ kabar baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, bahwa Yesus sangat mengasihi segala bangsa, dengan kasih yang menyelamatkan, Termasuk Bangsa Indonesia.

Hadir dengan menyuarkan Suara kenabian

Kehadiran orang kristen di tengah-tengah bangsa dan negara, seharusnya adalah kehadiran yang juga menegakkan kebenaran. Menyuarkan suara kenabian, serta berjuang menegakkan keadilan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sikap etis kristen juga ialah, tidak membiarkan perlakuan yang tidak manusiawi terus berlangsung. Katakan yang benar sekalipun mungkin resikonya adalah penderitaan. Rasul Petrus katakan; lebih baik menderita karena kebenaran dari pada menderita karena melakukan perbuatan jahat. Sebab demikianlah teladan Kristus.⁴⁸

Lebih baik menderita demi menegakkan kebenaran dari pada menderita karena menjadi pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau.⁴⁹ Terhadap pemerintah dan semua lembaga manusia yang memegang kekuasaan, sebagai orang kristen, kita diajar untuk tunduk dan taat kepada mereka yang diutus untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik,⁵⁰ sebab itu yang dikehendaki Allah.

Adalah kewajiban tiap warga negara, menyuarkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Warga negara yang baik dan bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan negaranya, warga negara yang menggunakan hak serta kewajibannya sebagai warga dan sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk terlibat dalam membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur. Seperti yang dikemukakan dalam Pasal 21 ayat 1 HAM PBB bahwa, Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.⁵¹

Hadir dan menjadi teladan

⁴⁶Lukas 10:25-37

⁴⁷bahasan pada halaman 19

⁴⁸1 Petrus 3:13-22, 2:11-12

⁴⁹1 Petrus 4:12-19

⁵⁰Pemerintah yang adil memang harusnya demikian, 1 Petrus 2:13-15

⁵¹lihat lampiran Deklarasi Universal HAM PBB

Jika Kristus Yesus mengajarkan kebenaran dan menunjukkan teladan dalam kasih,⁵² maka, orang kristen adalah utusan Kristus untuk menjadi teladan kasih di tengah-tengah bangsa ini. Menjadi teladan untuk segala kebaikan seperti yang diajarkan Kristus. Tidak memaksakan kehendak, tidak melakukan kejahatan. Petrus menuliskan; milikilah cara hidup yang baik dengan meneladani Kristus.⁵³ Atau seperti yang dikemukakan John Stott;

...kita harus menyimak lebih serius lagi apa maksud Yesus mengatakan bahwa umat kristiani harus menjadi teladan bagi masyarakat dan umat lain. Yang terbayang dibenak saya bukan saja tindak tanduk dan perilaku kristiani kita dalam rumah dan di tempat bekerja, dalam mana kita, selaku suami atau istri, orang tua atau anak, majikan atau karyawan, satu sama lain wajib menunjukkan sikap rendah hati di dalam takut akan Kristus. (efesus 5:21). Saya terpikir khususnya kepada kehidupan gereja setempat, yang diperuntukkan untuk menampilkan tanda-tanda kerajaan Allah.⁵⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang bukan hanya karena ia adalah anggota dari suatu masyarakat, tetapi terlebih lagi oleh karena ia adalah manusia ciptaan Tuhan.
2. Hak Asasi Manusia adalah hak yang sifatnya universal, yang harus diterima, diakui dan dihargai oleh semua umat manusia.
3. Pancasila dan UUD 45 juga merupakan rumusan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai HAM.
4. Alkitab firman Allah dengan tegas menyatakan Hak Asasi Manusia, serta memerintahkan untuk menghargai HAM.
5. Sebagai warga kerajaan Allah dan juga warga negara Indonesia, orang Kristen dipanggil untuk memiliki sikap etis yang jelas. Sikap yang didasarkan pada ajaran Alkitab yang selaras dengan nilai-nilai HAM secara universal serta yang tercantum dalam dasar negara yaitu Pancasila dan juga UUD 1945. Orang Kristen harus hadir membawa berita damai, menegakkan keadilan, mengasihi sesama manusia dan melakukan perbuatan baik demi tercapainya cita-cita negara yang adil dan Makmur.

⁵²Yohanes 3:16, Roma 5:5,8, Efesus 3:18, I Yoh. 3:16, 4:8, 16, dll.

⁵³1 Petrus 2:18-25, 4:1-11

⁵⁴John Stott, Isu-Isu Global..., hlm. 211-212

Lampiran :

Kutipan⁵⁵

A. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

B. MUKADIMAH

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,

Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak terpaksa akan memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan,

Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,

Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Bahwa bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara peserta telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

Bahwa pemahanan yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam mewujudkan janji tersebut sepenuhnya,

**Oleh karena itu, dengan ini Majelis Umum, memproklamkan
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia**

sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan

⁵⁵ Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global*. 577-584

berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional

C.

D. Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dimana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam pemeriksaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak-hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).
2. Hak-hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

Pasal 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak-hak yang sama dalam perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.
2. Perkawinan hanya dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negaranya.

Pasal 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
2. Tidak seorang pun dapat disiksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.
3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara.

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak-hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.
2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional

harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka bagi setiap orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak-hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya.

Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keutungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilmiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, dimana hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya dimana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh
2. Dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak-hak kepada suatu negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan apapun yang diatur dalam Deklarasi ini.

Buku Rujukan:

Alkitab. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014

Barker, Kenneth, ed. *The NIV Study Bible*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1985.

Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1994.

- Herlianto. *Gereja-gereja di tengah Gejolak Kota*. Bandung: YABINA, 1997.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis besar Haluan Negara*. Jakarta: SekNeg RI, n.d.
- Louis Berkhof. *Teologi Sistematika jilid 2*. Jakarta: LR II, 1995.
- Mulyono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988.
- Robertson, Geoffrey. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, perjuangan untuk mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: KomNas HAM RI, 2000.
- Sinclair B. Ferguson. *Khotbah di Bukit*. Surabaya: Momentum, 1999.
- Stott, John. *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen, Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- . *Etika Kristen Kapita Selekta*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.